



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Tahun 2021



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANGGAI**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2021 merupakan ikhtisar akuntabilitas yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai selama tahun 2021, atas pelaksanaan anggaran program dan kegiatan sesuai yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai.

Tidak lupa ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu atau terlibat dalam penyusunan LKjIP Tahun 2021 ini. Harapan kami semoga dokumen LKjIP Tahun 2021 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Dan LKjIP Tahun 2021 ini juga dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai pada tahun yang akan datang. Amin

Luwuk, 14 Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik,
dan Persandian Kabupaten Banggai



HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom

NIP. 19620912 199603 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Tahun 2021 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2021 menyajikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2016-2021.

Sejalan dengan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata, maka Dinas Kominfo telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dengan kebijakan yang tepat dan terarah melalui program dan kegiatan.

Tujuan strategis Dinas Kominfo adalah Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan Banggai Smart Regency dan sasaran strategisnya Meningkatkan layanan komunikasi dan informatika dengan indikator kinerja yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika.

Guna mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, pada tahun 2021 Dinas Kominfo telah merencanakan akan melaksanakan 64 sub kegiatan yang didukung dengan alokasi APBD Kabupaten Banggai sebesar **Rp.8.950.855.760**. Namun, adanya penyesuaian alokasi anggaran dan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan (*refocusing*) yang harus difokuskan pada penggunaan alokasi anggaran kegiatan dalam rangka penanganan dampak penyebaran Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan komposisi anggaran program dan kegiatan pada DPA Dinas Kominfo.

Setelah mengalami *refocusing* dan momen perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Dinas Kominfo hanya melaksanakan 63 sub kegiatan yang didukung dengan alokasi APBD sebesar **Rp. 8.163.693.853**.

Berdasarkan hasil analisa atas pencapaian sasaran kinerja utama Dinas Kominfo Kabupaten Banggai pada tahun 2021, **nilai IKM terhadap layanan komunikasi dan informatika** adalah **3,20** atau **79,95**. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan Dinas Kominfo termasuk **kategori B** sehingga kinerja pelayanan Dinas Kominfo untuk tahun 2021 dapat dikatakan **Baik**.

Jika dibandingkan pada tahun 2020 capaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Banggai mengalami peningkatan sebesar 3,71 dimana pada tahun 2019 capaian IKU sebesar 76,24. Nilai konversi IKM tahun 2021 ini belum sesuai target IKU Dinas Kominfo Tahun 2021 sebagaimana ditargetkan 84,57. Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Dinas Kominfo di tahun mendatang.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran Belanja Langsung atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo pada tahun 2021 sebesar **Rp.7.647.929.022,08** atau sebesar **93,68%**. Persentase realisasi anggaran belanja langsung tahun 2021 ini menurun jika dibandingkan dengan serapan anggaran Belanja Langsung pada tahun tahun 2020 sebesar 97,81%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Landasan Hukum.....	9
1.4. Sistematika Penyusunan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	25
4.1. Simpulan Umum	25
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	26
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (Per 31 Desember 2021)	5
Tabel 2.1	Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai	13
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Tahun 2021 ..	14
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2021.....	17
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2021	18
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo sesuai Renstra Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2017-2021	19
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021..	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai ...	4
----------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap organisasi publik saat ini diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

SAKIP dikembangkan secara integrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan dan sistem akuntabilitas pemerintahan. Substansi dari SAKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil. Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu rencana strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Laporan kinerja ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2021 merupakan ikhtisar pertanggungjawaban yang memuat secara lengkap tentang pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021. LKjIP ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, selanjutnya disingkat Dinas Kominfo merupakan perangkat daerah di Kabupaten Banggai yang tergolong masih sangat muda karena baru terbentuk pada Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Dinas Kominfo merupakan perangkat daerah yang terbentuk hasil penggabungan 3 (tiga) urusan pemerintahan serumpun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yakni urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika (yang sebelumnya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan), urusan statistik (sebelumnya kewenangan dari Bappeda) dan urusan persandian (sebelumnya kewenangan dari Bagian Humas Setda).

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, Dinas Kominfo merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, yang mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara kewenangan/ melaksanakan urusan pemerintahan daerah meliputi urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan (dari Pemerintah Pusat).

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kominfo mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur dasar data center dan e-Government, bidang hubungan media dan sumber daya komunikasi publik (SDKP), bidang persandian dan bidang statistik.
2. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur Dasar Data Center dan e-Government, bidang Hubungan Media dan SDKP, bidang Persandian dan Bidang Statistik.
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang Layanan Infrastruktur Dasar Data Center dan e-Government, Bidang Hubungan Media dan SDKP, bidang persandian dan bidang statistik.
4. Pengumpulan, pengolahan data dan Informasi serta evaluasi kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, Bidang Layanan Infrastruktur Dasar Data Center dan e-Government, Bidang Hubungan Media dan SDKP, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur dasar Data Center dan e-Government, bidang hubungan media dan SDKP, bidang persandian dan bidang statistik.
6. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Kominfo terdiri atas :

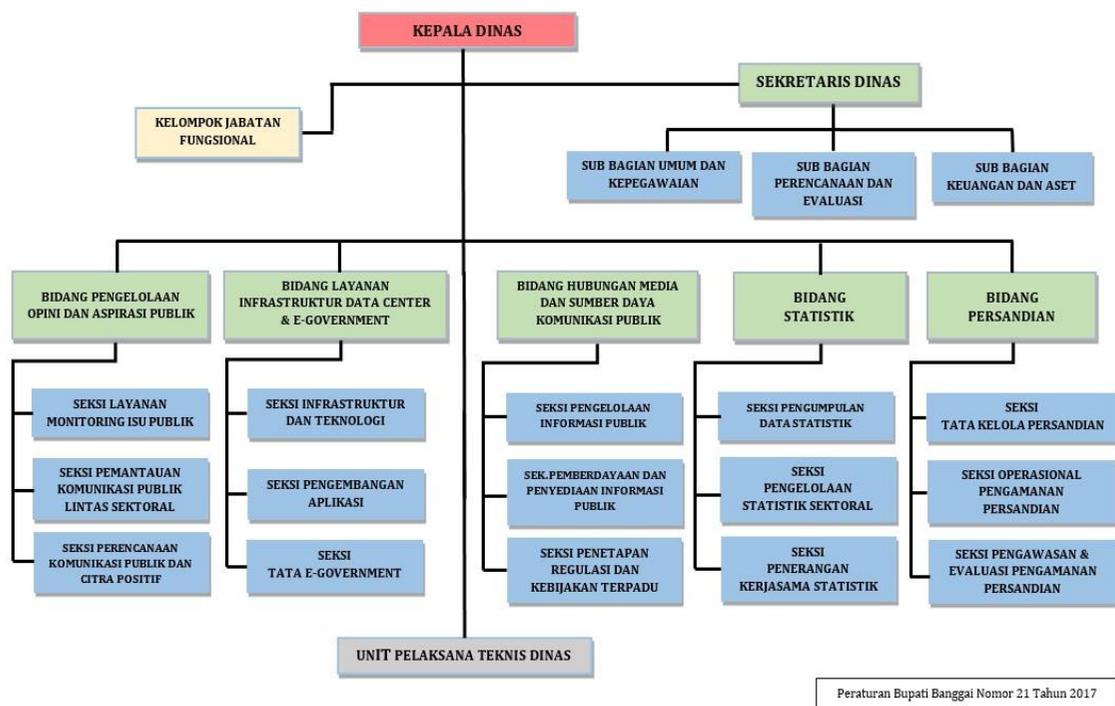
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat Dinas, yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, yang meliputi Seksi Layanan Monitoring dan Isu Publik; Seksi Pemantauan Komunikasi Publik Lintas Sektoral; dan Seksi Perencanaan Komunikasi dan Citra Positif.
4. Bidang Layanan Infrastruktur Data Center dan e-Government yang meliputi Seksi Infrastruktur dan Teknologi; Seksi Pengembangan Aplikasi; dan Seksi Tata e-Government.

5. Bidang Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik, yang meliputi : Seksi Pengelolaan Informasi Publik; Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Informasi Publik; dan Seksi Penetapan Regulasi dan Kebijakan Terpadu.
6. Bidang Statistik, yang meliputi Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral; Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral; dan Seksi Penerangan Kerjasama Statistik.
7. Bidang Persandian, yang meliputi Seksi Tata Kelola Persandian; Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian Struktur Organisasi Dinas Kominfo dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kominfo didukung oleh 45 (empat puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 30 (tiga puluh) orang Tenaga Honorer. Jumlah ASN Dinas Kominfo yang terinci berdasarkan klasifikasi dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Data ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai
(Kondisi per 31 Desember 2021)

No	Klasifikasi Berdasarkan	Jumlah (Org)	Persentase (%)	Keterangan
1.	Status Pegawai			
	- PNS	43	100,00	
	- CPNS	-	0,00	
2.	Jenis Kelamin			
	- Laki-laki	26	58,14	
	- Perempuan	18	41,86	
3.	Tingkat Pendidikan			
	- SMP / sederajat	-	0,00	
	- SMA / sederajat	1	2,33	
	- D1 / D2 / D3	1	2,33	
	- S1	37	83,72	
	- S2	5	11,63	
	- S3	-	0,00	
4.	Golongan			
	- Golongan IV	6	13,95	
	- Golongan III	37	86,05	
	- Golongan II	-	0,00	
	- Golongan I	-	0,00	
5.	Agama			
	- Islam	35	81,40	
	- Kristen	7	16,28	
	- Hindu	1	2,33	
	- Buddha	-	0,00	
	- Katholik	-	0,00	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo Kab.Banggai

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Kominfo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Banggai. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfo yakni berikut :

1. Pengembangan layanan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat, aman dan tepat. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
 - Peningkatan kapasitas aksesibilitas (bandwidth);
 - Pengintegrasian aplikasi informatika;
 - Penyediaan server basis data dan aplikasi;
 - Penyediaan dan pengembangan aplikasi layanan publik baik yang berbasis web maupun mobile; dan
 - Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur di bidang komunikasi dan informatika.
2. Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Peningkatan akses layanan informasi dan komunikasi publik yang profesional
3. Penyediaan data statistik sektoral sekaligus menjamin tingkat keakuratan data sektoral. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Implementasi Satu Data Kabupaten Banggai
 - Peningkatan diseminasi data statistik sektoral yang termutakhirkan
4. Penguatan kebijakan implementasi tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Penyusunan peraturan daerah dalam bentuk Perda dan Perbup tentang kelola keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - Penataan dan penguatan kelembagaan organisasi pelaksana urusan persandian
5. Pengembangan dan penerapan teknologi keamanan dan sarana pendukung keamanan informasi. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan teknologi keamanan informasi dan sarana untuk mendukung penyelenggaraan keamanan informasi pemerintah daerah

Sesuai uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo, dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Kominfo antara lain :

1. Masih adanya kesenjangan digital di beberapa wilayah Kabupaten Banggai

Kesenjangan digital selalu disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi.

Permasalahan kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Banggai banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha juga menyebabkan adanya *blank spot* di wilayah non-komersial seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Balantak Utara dan pesisir Kecamatan Bunta. Kendala serius yang juga dihadapi pemerintah Kabupaten Banggai untuk mengatasi kesenjangan digital terletak pada cara pandang masyarakat mengenai pemanfaatan TIK, sehingga pemerintah perlu meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan

2. Kebutuhan akses internet untuk Puskesmas, SMK/SMU dan Desa

Berdasarkan data statistik dari Buku Kabupaten Banggai Dalam Angka Tahun 2020, Kabupaten Banggai memiliki 291 Desa, 26 Puskesmas Induk, 22 SMU, dan 12 SMK. Dari jumlah tersebut sebanyak 80% Puskesmas Induk, 19 SMU, 9 SMK dan kurang lebih 60% desa di Kabupaten Banggai memerlukan ketersediaan akses internet dan pemberdayaan TIK melalui e-literasi. Desa membutuhkan penyediaan, penguatan, dan peningkatan akses internet untuk penyebaran informasi publik bidang pertanian. Tersedianya akses internet dalam kaitannya dengan desa pertanian dapat memudahkan petani untuk mencari informasi mengenai bibit unggul, harga pupuk, ataupun teknik bercocok tanam yang baik serta segala informasi yang menyangkut bidang pertanian sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi.

Selain itu, dengan adanya internet, petani dapat mempromosikan hasil pertanian kepada calon pelanggan di luar kota lebih cepat sehingga tingkat ekonomi petani juga dapat meningkat.

3. Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Perangkat Daerah

E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain. Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan e-government antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government secara nasional. Selain itu, terbatasnya SDM bidang TIK dan keterbatasan anggaran menyebabkan kurang optimalnya penerapan, pelayanan dan pengelolaan e-government perangkat daerah di Kabupaten Banggai. Secara eksternal, hal ini dipengaruhi juga oleh belum optimalnya pemuktahiran (*update*) database dari perangkat daerah dan belum optimalnya sosialisasi penerapan aplikasi informatika pada perangkat daerah.

4. Layanan Pengurusan Rekomendasi / Izin dan Administrasi Teknis

Tidak terkontrolnya kelayakan administrasi dan teknis lembaga penyiaran lokal, Papan Reklame (*Billboard*), Pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS) dan Penggelaran Kabel Serat Optik (FO) banyak disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya masih ada masyarakat pemohon belum mengetahui bahwa proses perizinan harus melalui Dinas Kominfo sehingga kadangkala mengabaikan persyaratan rekomendasi teknis dari Dinas Kominfo.

5. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Belum termanfaatkannya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media penyampaian informasi bagi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam penyebarluasan kebijakan pemerintah seperti Kelompencapir pada masa orde baru sangat efisien. Sesuai perkembangan jaman, model kelompencapir bermetamorfosis menjadi KIM. Adanya kelompok ini dapat mengintensifkan tersampainya informasi kepada masyarakat. Selain KIM saat ini juga terdapat telecenter yang menjadi wadah bagi kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarluaskan informasi baik secara vertikal maupun horizontal.

6. Maraknya Hoaks, Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware

Maraknya konten hoaks, konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, *malware* dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banggai harus hadir dalam upaya penanganan konten ilegal tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri tentang DNS Nasional.

7. Perubahan paradigma dan kewenangan urusan persandian

Transformasi fungsi persandian yang awalnya pengamanan informasi rahasia, menjadi kegiatan untuk mengamankan data, informasi dan aset informasi secara keseluruhan.

8. Diseminasi Data Statistik Sektoral yang belum optimal

Pada prinsipnya belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi data statistik sektoral oleh Dinas Kominfo dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparatur di bidang statistik, belum terkoordinasinya pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral dengan perangkat-perangkat daerah yang terkait dan belum adanya regulasi daerah untuk mendukung penyelenggaraan survei data maupun kompilasi produk administrasi data statistik sektoral di Kabupaten Banggai.

9. Sarana dan Prasarana Aparatur

Masih terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas seperti belum tersedianya ruang server, Media Center, ruang rapat dan ruang kerja pegawai yang representatif dan memadai.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- BAB. I PENDAHULUAN, yang menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan LKjIP, gambaran umum Dinas Kominfo, strategi dan arah kebijakan, isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Kominfo, dasar hukum penyusunan LKjIP serta sistematika penulisan LKjIP, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik;
- BAB II PERENCANAAN KINERJA, yang menguraikan tentang ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2021.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, yang memaparkan tentang Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kominfo pada tahun 2021.
- BAB IV PENUTUP, yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kominfo, rencana tindak lanjut dan komitmen yang akan dilakukan Dinas Kominfo untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang..

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses pegawai dan atasan langsungnya secara bersama-sama menyiapkan dan menyepakati pekerjaan yang harus dilakukan pada satu tahun tertentu, menentukan sasaran kinerja dan target yang harus diukur melalui indikator kinerja, serta mengidentifikasi dan merencanakan cara mengatasi kendala yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja Dinas Kominfo Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2021.

Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo yang berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 serta tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021 telah ditetapkan Visi dan beberapa Misi utama dari Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih, seperti mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan nilai-nilai kearifan lokal, budaya dan agama serta peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata.

Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Kabupaten Banggai saat ini dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai tantangan lima tahun ke depan serta memperhatikan amanat konstitusional, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**. Sebagai penjabaran atas visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2016-2021 sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) serta akuntabel menuju pemerintahan yang berwibawa;
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi;
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah;
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
5. Mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan agama;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Dari 6 misi tersebut, fokus Dinas Kominfo terdapat pada misi keempat, yaitu “Mewujudkan penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata”. Selain fokus pada misi keempat, Dinas Kominfo juga akan tetap mendukung misi pertama pemerintah yaitu “Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) serta akuntabel menuju pemerintahan yang berwibawa”. Misi tersebut akan dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Kominfo melakukan upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran selama lima tahun ke depan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai tersebut, maka salah satu arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sangat berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika yaitu penyediaan dan peningkatan infrastruktur melalui pengembangan teknologi informasi, dengan sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas publik terhadap layanan informasi dan komunikasi, meningkatnya keterbukaan informasi publik, dan meningkatnya keamanan data dan informasi pemerintah daerah. Hal ini menandakan bahwa bidang komunikasi dan informatika dalam tatanan pembangunan daerah Kabupaten Banggai memegang peranan yang sangat strategis, karena selain bertujuan untuk menyediakan informasi bagi seluruh penduduk, juga memberi kontribusi yang besar dalam perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Banggai.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, maka upaya-upaya akan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banggai yakni dengan menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik melalui pemanfaatan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengaplikasikan dan mengintegrasikan sistem pelayanan administrasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), mengoptimalisasi pemanfaatan TIK untuk layanan informasi publik, memfasilitasi ketersediaan *smart area* berupa pemasangan wifi gratis di beberapa ruang publik dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah yang masih *blankspot*.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut, Dinas Kominfo telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang disajikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai

VISI :	MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA		
MISI :	MEWUJUDKAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN MERATA		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi dalam mewujudkan Banggai Smart Regency	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Pengembangan layanan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat, aman dan tepat	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi - Peningkatan kapasitas aksesibilitas (bandwidth) - Pengintegrasian aplikasi informatika - Penyediaan server basis data dan aplikasi - Penyediaan dan pengembangan aplikasi layanan publik baik yang berbasis web maupun mobile - Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur di bidang komunikasi dan informatika
		Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan akses layanan informasi dan komunikasi publik yang profesional
		Penyediaan data statistik sektoral sekaligus menjamin tingkat keakuratan data sektoral	Peningkatan diseminasi data statistik sektoral yang termuktahirkan
		Penguatan kebijakan implementasi tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan peraturan daerah dalam bentuk Perda dan Perbup tentang kelola keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten - Penataan dan penguatan kelembagaan organisasi pelaksana urusan persandian
		Pengembangan dan penerapan teknologi keamanan dan sarana pendukung keamanan informasi	Pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan teknologi keamanan informasi dan sarana untuk mendukung penyelenggaraan keamanan informasi pemerintah daerah

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2016-2021, maka Dinas Kominfo menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kerja, baik untuk indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (*outcome*) maupun indikator kinerja kegiatan (*input* dan *output*). Target kinerja ini yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Pada Renja Tahun 2021 telah ditetapkan 5 program, 10 kegiatan dan 64 sub kegiatan sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Tahun 2021

Kode Prog / Sub Keg	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATKA
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
2.16 .01.2.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
2.16.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16 .01.2.02.	Administrasi Keuangan
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.16.01.2.02.02	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.16.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksana Verifikasi
2.16.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.16.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.16.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2.16.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.16 .01.2.03.	Administrasi Umum
2.16.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.16.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.16.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.16.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.16.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.16.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.16.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan
2.16.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.16.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.16.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.16.01.2.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.16.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
2.16.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2.16.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.16.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.16.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.16.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur
2.16.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.16.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
2.16.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.16.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.16.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.16 .01.2.04.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.16.01.2.04.01	Pengadaan Mesin Kartu/Absensi
2.16.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2.16.01.2.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
2.16.01.2.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri
2.16.01.2.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
2.16.01.2.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
2.16.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.16.01.2.04.10	Sosialisasi Peraturan dan Perundangan-undangan
2.16.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16 .02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi KrISIS
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16 . 03.2.01 . 01.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
2.16 . 03.2.01 . 02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.16 . 03.2.01 . 03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Sistem Informasi
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan desiminasi Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam dokumen LKjIP, capaian kinerja yang diukur adalah target kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan IKU. Merujuk pada Renstra Dinas Kominfo Tahun 2016-2021 dan Renja Dinas Kominfo Tahun 2021, maka telah ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kominfo pada tahun 2021 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Ket.
1	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	86,93	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	427.565.245,00	IKU
				Program Aplikasi Informatika	1.029.317.500,00	
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	106.281.500,00	
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	196.544.000,00	
Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis IKU					1.759.708.245,00	
2	Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.191.147.515,00	Non IKU
				Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis Non IKU		
Total Pagu Anggaran					8.950.855.760,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian visi misi dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya, dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai capaian kinerja Dinas Kominfo dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Kominfo telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2021 ini, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2021. Berikut ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2021.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja	Ket
1	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	IKM terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	86,93	79,95	Baik	Berdasarkan hasil Survei IKM Tahun 2021
2	Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo	85 (A)	61,85 (B)	Baik	Berdasarkan LHE SAKIP Tahun 2019. Belum ada LHE 2021

IKM terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfo yang digunakan sebagai tolok ukur dari kualitas pelayanan Dinas Kominfo apakah sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang telah diisyaratkan oleh pemerintah. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan komunikasi dan informatika didasarkan pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. IKM digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang telah diberikan Dinas Kominfo.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo diperoleh simpulan bahwa :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Kominfo Tahun 2021 adalah sebesar **79,95**. Hal ini menunjukkan bahwa **mutu pelayanan Dinas Kominfo termasuk kategori B** sehingga kinerja pelayanan Dinas Kominfo untuk tahun 2021 dapat dikatakan **Baik**.
2. IKM terhadap layanan komunikasi dan informatika tahun 2021 belum sesuai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfo Tahun 2021 sebagaimana ditargetkan dengan nilai IKM 86,93 (mutu pelayanan A atau kinerja pelayanan Sangat Baik). Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan publik Dinas Kominfo di tahun 2022.
3. Capaian kinerja tahun 2021 meningkat 3,71 jika dibandingkan nilai IKM layanan kominfo tahun 2020 yang memperoleh nilai 76,24. Walaupun tidak signifikan tetapi Dinas Kominfo senantiasa berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
4. Nilai akuntabilitas kinerja (AK) Dinas Kominfo yang tercantum dalam Tabel 3.1 di atas masih menggunakan nilai AK tahun 2019. Hal ini dikarenakan belum diperolehnya Nilai AK Dinas Kominfo Tahun 2021. Sampai dengan LKjIP ini selesai disusun, Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai belum menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo Tahun 2021.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran Dinas Kominfo sampai Tahun 2021 dengan target kinerja sasaran jangka menengah sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Sesuai Renstra Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2016-2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi / Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	IKM terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	81,00	84,57	86,93	-	-	75,66	76,24	79,95

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas maka dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran Dinas Kominfo sampai dengan Tahun 2021 masih jauh dari apa yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan publik Dinas Kominfo di tahun 2021. Perlu ada komitmen kuat dari segenap jajaran pimpinan maupun staf pelaksana yang di Dinas Kominfo untuk dapat melakukan perbaikan kinerja secara sistematis dan masif.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi

Dinas Kominfo telah melakukan analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi selama tahun 2021.

1. Adanya penyesuaian alokasi anggaran dan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan (*refocusing*) yang harus difokuskan pada penggunaan alokasi anggaran kegiatan dalam rangka penanganan dampak penyebaran Covid-19. Hal menyebabkan terjadinya perubahan sangat signifikan terhadap komposisi anggaran yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo.
2. Belum terintegrasinya database dan layanan e-government perangkat daerah di Kabupaten Banggai. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya jaringan internet pada beberapa perangkat daerah yang terkoneksi ke pusat data (server) Dinas Kominfo dan kurangnya anggaran yang mendukung penyediaan jaringan intra pemda khususnya jaringan *fiber optic* (FO).
3. Implementasi e-government/SPBE di Kabupaten Banggai belum dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten dan penuh komitmen. Hal ini menyebabkan Indeks SPBE Kabupaten Banggai masih rendah.
4. Belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informatika. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman tupoksi dan Penempatan PNS dalam jabatan tidak sesuai kompetensi dan tidak berdasarkan prinsip *the right man in the right place and the right man in the right job*.
5. Masih terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi. Permasalahan kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Banggai banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta

penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata.

6. Data statistik sektoral yang ada belum memiliki rekomendasi BPS. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kerjasama tertulis (MoU) antara Dinas Kominfo dengan BPS.
7. SDM kurang berkompeten di bidang pengelolaan data statistik sektoral. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan di bidang statistik sektoral.
8. Tidak ada SDM sandi dan peralatan persandian yang dibutuhkan mendukung pengamanan data/ informasi pemda. Hal ini disebabkan Petugas Sandiman telah dimutasi/ dipromosi untuk menduduki jabatan eselon IV di Bidang Hubungan Media dan SDKP Dinas Kominfo.
9. Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data/ informasi pemda tidak jelas. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi daerah (Perda/Perbup) terkait penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai.

Beberapa solusi sebagai upaya alternatif yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo dalam mengendalikan permasalahan yang dihadapi selama tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur komunikasi dan informatika (jaringan internet) melalui penyediaan jaringan serat optik (FO) pada perangkat daerah untuk mengatasi kendala tidak terintegrasinya sistem database aplikasi perangkat daerah ke pusat data (*data center*) Dinas Kominfo. Oleh karena itu, perlu terus dikembangkan di berbagai aspek yang mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan publik yang mencakup antara lain : infrastruktur, aplikasi, kelembagaan dan kebijakan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Banggai. Pengembangan infrastruktur TIK terutama jaringan FO sehingga dapat diwujudkan kecepatan pelayanan jaringan, sehingga kinerja seluruh perangkat daerah dan fungsi pelayanan publik dapat maksimal;
2. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi melalui penyediaan alat penguat sinyal (*repeater*) pada wilayah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi (*blankspot area*). Selain itu, intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meyakinkan dan melatih masyarakat bahwa penggunaan TIK mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat serta mudah digunakan di berbagai aspek bidang kehidupan.

3. Untuk meningkatkan SDM aparatur yang profesional dan proporsional, Dinas Kominfo akan lebih intensif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banggai. Selain itu, Dinas Kominfo akan berupaya mengikutsertakan ASN yang dimiliki untuk mengikuti dalam pelatihan TIK, statistik dan persandian.
4. Peningkatan kerjasama di bidang statistik dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai;
5. Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Persandian di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
7. Dalam pengelolaan keamanan data dan informasi pemerintah daerah, perlu menggunakan metode enkripsi yang dikembangkan sendiri pada semua aplikasi dan peralatan jaringan komputer.
8. Dalam pengelolaan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik, masyarakat dapat dimudahkan menyampaikan keluhannya melalui aplikasi e-LAPOR sehingga untuk masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat kota dapat menghemat biaya dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan, sekaligus langsung didistribusikan kepada perangkat daerah terkait agar segera ditindaklanjuti.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Kominfo telah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi Penggunaan Sumber daya Dinas Kominfo Tahun 2021 meliputi:

1. Efisiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Kominfo dalam rangka mencapai sasaran kinerja sesuai dengan target Renja Tahun 2021 terlihat dari realisasi pelaksanaan anggaran Belanja sebesar Rp.7.647.929.022,08 atau 93,68% dari pagu anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.8.163.693.853,00. Terjadi efisiensi anggaran sebesar 6,32%.

2. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari Penggunaan sarana TIK untuk penyebarluasan/diseminasi informasi pemerintah daerah melalui *Multi Display Information* (Videotron) untuk saat ini hanya dilakukan saat malam hari jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam. Selain itu, Dinas Kominfo lebih memanfaatkan media online untuk lebih mengefektifkan penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat.

3. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dinas Kominfo melakukan pengurangan tenaga honorer sebanyak 3 orang yang dinilai tidak bekerja efektif. Hal ini juga dilakukan untuk lebih mengefektifkan kinerja seluruh pegawai serta optimalisasi pemanfaatan sarana TIK dalam pelaksanaan kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Kominfo telah melakukan analisa terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan analisis terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja selama tahun 2021 antara lain :

1. Fasilitasi pelaksanaan telekonferensi/rapat-rapat pemerintah daerah yang diselenggarakan secara online melalui *video conference* (vidcon). Hal ini dilakukan bertujuan untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit Corona (Covid-19). Adanya dukungan dari perangkat daerah (PD) yang menangani sendiri peralatan jaringan lingkup internal PD sehingga pengelola jaringan kabupaten bisa fokus menangani jaringan utama (*backbound*) antar PD, serta dukungan dari PD yang berusaha mengamankan sendiri setiap perangkat yang digunakan terutama data dan aplikasi dengan tingkat security level menengah.
2. Pemeliharaan Pusat Data (*Data Center*) dan pengembangan (*upgrade*) server Dinas Kominfo dilakukan secara berkala. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi penunjang integrasi aplikasi SIM Kehadiran dan Kinerja PNS.
3. Pelaksanaan koodinasi dan fasilitasi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Penyelenggaraan Satu Data Banggai dan Penyelenggaraan Kominfo di Kabupaten Banggai.
4. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan.
5. Pengembangan dan pengelolaan website pemerintah daerah (banggai.go.id) yang bertujuan membantu penyampaian informasi kepada masyarakat, yang mendukung publikasi melalui media cetak, media sosial dan media online.
6. Diseminasi dan penyebarluasan informasi Program Pencegahan Stunting.

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2021, realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kominfo pada Tahun Anggaran 2021 adalah **Rp.7.647.929.022,08** atau sebesar **93,68%**. Persentase realisasi anggaran belanja langsung tahun 2021 ini agak menurun jika dibandingkan dengan serapan anggaran belanja pada tahun 2020 yang sebesar 97,81%, tahun 2018 sebesar 94,43% dan tahun 2017 sebesar 99,20%. Tapi masih lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang hanya sebesar 84,56%. Realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kominfo berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program Tahun Anggaran 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		7.305.712.358	7.003.118.982,08	95,85
2	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		298.794.245	285.693.745	95,61
3	APLIKASI INFORMATIKA		271.346.500	164.549.195	60,64
4	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		145.598.500	125.112.600	85,92
5	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		142.242.250	69.454.500	48,82
Jumlah			8.163.693.853	7.647.929.022,08	93,68

Sesuai rencana kerja program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2021, Dinas Kominfo sedianya akan melaksanakan **64 sub kegiatan**. Setelah mengalami tahapan *refocusing* dan momen perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, menjadi **63 sub kegiatan** yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2021 ini adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo. Dari LKjIP ini dapat diketahui gambaran kinerja Dinas Kominfo selama tahun 2021 Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja Dinas Kominfo diperoleh simpulan bahwa :

1. Pencapaian sasaran kinerja utama Dinas Kominfo pada tahun 2021, nilai IKM terhadap layanan komunikasi dan informatika adalah 79,95. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan Dinas Kominfo termasuk kategori B sehingga kinerja pelayanan Dinas Kominfo untuk tahun 2021 dapat dikatakan Baik. Jika dibandingkan pada tahun 2020 capaian kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Banggai mengalami peningkatan sebesar 3,71 dimana pada tahun 2020 capaian IKU sebesar 76,24. Nilai konversi IKM tahun 2021 ini belum sesuai target IKU Dinas Kominfo Tahun 2021 sebagaimana ditargetkan 86,93. Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Dinas Kominfo di tahun mendatang.
2. Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran Belanja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kominfo pada tahun 2021 sebesar Rp.7.647.929.022,08 atau sebesar 93,68%. Persentase realisasi anggaran belanja tahun 2021 ini agak menurun jika dibandingkan dengan serapan anggaran belanja pada tahun 2020 yang sebesar 97,81%, tahun 2018 sebesar 94,43% dan tahun 2017 sebesar 99,20%. Tapi masih lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang hanya sebesar 84,56%.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, menunjukkan capaian kinerja terhadap sasaran Dinas Kominfo, rata-rata telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya persiapan awal secara teknis baik survei dan identifikasi terhadap lokasi pelaksanaan kegiatan maupun kurangnya tenaga teknis / SDM yang dimiliki oleh Dinas Kominfo.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 diharapkan dapat ditingkatkan. Demikian pula kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat diperbaiki dan disempurnakan pada tahun 2022. Dalam mengantisipasi dan meminimalkan permasalahan / kendala yang telah terjadi dilaksanakan upaya pemecahan masalah. Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Perlunya komitmen dan upaya yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja pegawai dan kinerja birokrasi Dinas Kominfo antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya pegawai secara intensif dan berkelanjutan, optimalisasi koordinasi, komunikasi dan partisipasi aktif seluruh jajaran organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih efektif dan efisien.
2. Perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran berdasarkan Rencana Strategis dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
3. Tetap berpedoman pada mekanisme dan SOP pelaksanaan kegiatan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Perlunya pengawalan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.

Tantangan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika ke depan masih memerlukan upaya dan kerja keras Dinas Kominfo. Apalagi Dinas Kominfo ditargetkan untuk dapat merancang dan mewujudkan konsep **Kota cerdas (Smart City)** di Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan kegiatan inovasi baru yang dapat ikut meningkatkan SDM aparatur Dinas Kominfo baik melalui diklat formal maupun pelatihan-pelatihan di bidang kominfo yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Dinas Kominfo dalam mewujudkan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banggai.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, kiranya diharapkan apa yang menjadi target sasaran kinerja dapat tercapai untuk tahun berikutnya, dan akan berdampak pada peningkatan kinerja Dinas Kominfo. Akhirnya kami berharap agar komitmen di atas dapat mewujudkan upaya peningkatan kinerja Dinas Kominfo pada tahun mendatang. Amin

LAMPIRAN



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI

- Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
 3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
- Tugas : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dinas yaitu urusan wajib bidang komunikasi dan informatika meliputi pengelolaan informasi publik pemerintah daerah, pengelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan *e-government*, urusan statistik yang meliputi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten Banggai dan urusan persandian yang meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Banggai sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika
 4. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Visi : Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya
- Misi :
1. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata (Misi IV)
 2. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) menuju pemerintahan yang berwibawa (Misi I)
- Tujuan Strategis :
1. Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam Mewujudkan Banggai Smart Regency
 2. Meningkatkan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang baik, bersih dan akuntabel
- Sasaran Strategis :
1. Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika
 2. Meningkatnya tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika yang baik, bersih dan akuntabel

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Alasan Pemilihan Indikator, Definisi, Formulasi Pengukuran, Sumber Data dan Penanggung Jawab)																									
1.	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Dengan melihat indeks layanan ini tentunya dapat menjadi gambaran dari persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Definisi : Layanan komunikasi dan informatika merupakan upaya dalam mengelola, menyediakan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pencerahan dan penerangan bagi masyarakat, memberikan nilai-nilai pendidikan kepada masyarakat, memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, dan membangun semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Dilakukan survei responden/ publik terhadap kinerja pelayanan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 7 indikator penilaian yaitu : Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk, Penanganan Pengaduan, dan Sarana / Prasarana</p> <p>IKM terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika = <u>Total dari Nilai Persepsi Per Unsur</u> x 100 Total Unsur yang terisi</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Layanan yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100, 00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat</p> <p>Penanggung Jawab : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100, 00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																								
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																								
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																								
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																								
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100, 00	A	Sangat Baik																								

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2016 - 2021**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2016	Tahun Target IKU					Keterangan
					2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam Mewujudkan Banggai Smart Regency	Tingkat layanan komunikasi dan informatika	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	-	81,00 (Sangat Baik)	84,57 (Sangat baik)	86,93 (Sangat Baik)	Kondisi awal tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih menggunakan IKU lama.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2021**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

NAMA : **H. HERWIN YATIM**
Jabatan : **BUPATI BANGGAI**
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Luwuk, 11 Januari 2021

Pihak Kedua
BUPATI BANGGAI


H. HERWIN YATIM

Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai



HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom
NIP. 19620912 199603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ket.
1.	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika		86,93 (Sangat Baik)	IKU
2.	Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo		85 / A	Non IKU

Program

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	7.191.147.515
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	427.565.245
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp.	1.029.317.500
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp.	106.281.500
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp.	196.544.000

Jumlah : Rp. 8.950.855.760

Luwuk, 11 Januari 2021

Pihak Kedua
BUPATI BANGGAI


H. HERWIN YATIM

Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai



HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom

NIP. 19620912 199603 1 002

Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Ket.
1	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Komunikasi dan Informatika	86,93	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	427.565.245,00	IKU
				Program Aplikasi Informatika	1.029.317.500,00	
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	106.281.500,00	
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	196.544.000,00	
				Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis IKU		
2	Meningkatnya tata kelola Dinas Kominfo yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.191.147.515,00	Non IKU
				Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Startegis Non IKU		
Total Pagu Anggaran					8.950.855.760,00	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2																			
2	16																		
2	16	01																	
2	16	01	2.01																
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tepat waktu	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan & Evaluasi Kinerja yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	2 Dokumen	100 %	5,000,000				Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	5,750,000
2	16	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA yang tepat waktu	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan & Evaluasi Kinerja yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	4 Dokumen	100 %	30,000,000				Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	34,500,000
2	16	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah dokumen Anjab, Evjab, SOP, SKM, SPIP dan Laporan IKMyang disusun	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan & Evaluasi Kinerja yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	6 Dokumen	100 %	10,000,000				Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	11,500,000
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Dinas Kominfo	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan & Evaluasi Kinerja yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 0	6 Kali	100 %	70,000,000				Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	96,600,000
2	16	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah dokumen LKJIP yang tersusun secara akuntabel	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan & Evaluasi Kinerja yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Dokumen	100 %	6,000,000				Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	6,900,000
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan														
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Tingkat Pemenuhan penatausahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	45 Orang	100 %	3,206,802,756				Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	3,669,210,937
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah tambahan penghasilan PNS yang dibayarkan	Tingkat Pemenuhan penatausahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Tahun	100 %	1,755,470,138				Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	1,853,079,477
2	16	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah berkas SPP/ SPM yang diverifikasi	Tingkat Pemenuhan penatausahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	300 SPP/ SPM	100 %	2,500,000				Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	2,875,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	16	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	Tingkat Pemenuhan penatausahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Dokumen	100 %	2,500,000			Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	2,875,000
2	16	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah laporan bulanan TEPRAs yang tersusun secara akuntabel	Tingkat Pemenuhan penatausahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	12 Dokumen	100 %	2,700,000			Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	3,105,000
2	16	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semester yang tersusun	Tingkat Pemenuhan penatausahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	31 Dokumen	100 %	3,000,000			Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	3,450,000
2	16	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	Tingkat Pemenuhan penatausahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Dokumen	100 %	2,000,000			Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	2,300,000
2	16	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan yang tersusun	Tingkat Pemenuhan penatausahaan keuangan yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Dokumen	100 %	2,700,000			Tingkat Pemenuhan Penatausahaan keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	3,105,000
2	16	01	2.03		Administrasi Umum								1,770,600,000					2,265,040,000
2	16	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah materai yang dibutuhkan	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Luwuk	100 0	820 Lembar	100 %	3,600,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	4,140,000
2	16	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah jaringan air, listrik dan internet	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	3 Jaringan	100 %	438,600,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	504,390,000
2	16	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah kendaraan dinas roda empat/ dua yang diurus izin STNK-nya	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	10 Unit	100 %	10,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	11,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
													Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	30 Orang	100 %	558,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	641,700,000							
2	16	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan/bahan pembersih	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	2 Jenis	100 %	46,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	52,900,000							
2	16	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	22 Jenis	100 %	31,729,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	36,488,350							
2	16	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah barang cetakan dan fotocopy berkas administrasi perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	2 Jenis	100 %	16,200,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	18,630,000							
2	16	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah alat / komponen instalasi listrik	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	10 Jenis	100 %	9,861,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	11,340,150							
2	16	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	4 Jenis	100 %	12,500,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	17,825,000							
2	16	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah surat kabar yang dibutuhkan	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	2304 Eksemplar	100 %	9,360,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	10,764,000							
2	16	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah bahan logistik yang dibutuhkan	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	2 Jenis	100 %	10,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	11,500,000							
2	16	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah makanan/minuman yang dibutuhkan	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1034 Dos	100 %	25,850,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	29,727,500							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
													Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 0	16 Kali	100 %	100,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	165,600,000							
2	16	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 0	3 Unit	100 %	75,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	143,750,000							
2	16	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Semua Kelurahan	100 0	4 Jenis	100 %	20,500,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	23,575,000							
2	16	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Semua Kelurahan	100 0	5 Jenis	100 %	80,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	132,250,000							
2	16	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Meubelair kantor yang diadakan	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	4 Jenis	100 %	40,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	65,550,000							
2	16	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah bangunan gedung kantor yang pelihara secara berkala	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	2 Bangunan gedung	100 %	60,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	80,500,000							
2	16	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	10 Unit	100 %	44,400,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	51,060,000							
2	16	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	13 Unit	100 %	9,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	10,350,000							
2	16	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	6 Jenis	100 %	70,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	80,500,000							

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	16	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah ruangan kantor yang direhabilitasi	Cakupan Layanan Administrasi dan sarana prasarana Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	5 Ruang	100 %	100,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	161,000,000
2	16	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					178,300,000				492,890,000				
2	16	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah mesin absensi yang diadakan	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Buah	100 %	9,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	10,350,000
2	16	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah pakaian dinas harian beserta atributnya yang diadakan	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Semua Kelurahan	100 0	77 Pasang	100 %	69,300,000			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	79,695,000
2	16	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Pakaian kerja lapangan yang diadakan	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Semua Kelurahan	100 0	77 Pasang	100 %	0			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	70,840,000
2	16	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Semua Kelurahan	100 0	0 Pasang	100 %	0			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	46,575,000
2	16	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah pakaian olahraga dan pakaian batik yang diadakan	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Semua Kelurahan	100 0	0 Pasang	100 %	0			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	141,680,000
2	16	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Pegawai yang purna tugas/pensiun	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Orang	100 %	5,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	5,750,000
2	16	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Formal	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 0	10 Orang	100 %	75,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	115,000,000
2	16	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Peraturan yang disosialisasikan	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	2 Peraturan	100 %	10,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	11,500,000
2	16	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Jumlah Bimtek yang diselenggarakan bagi ASN	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi PD	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	2 Kegiatan	100 %	10,000,000			Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 0	11,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
																			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
																								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Jumlah situs web daerah yang dikelola dengan baik	Tingkat pengelolaan domain/ sub domain di kabupaten Banggai	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Situs web	100 %	0						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	100 0	25,760,000											
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Jumlah laporan pengawasan nama domain dan sub domain milik pemda	Tingkat pengelolaan domain/ sub domain di kabupaten Banggai	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Dokumen	100 %	16,794,889						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	100 0	17,250,000											
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Jumlah jaringan intra pemda	Tingkat pengelolaan domain/ sub domain di kabupaten Banggai	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	36 Jaringan	100 %	50,000,000						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	100 0	57,500,000											
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								930,000,000								1,023,500,000											
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Jumlah laporan pengawasan e-government pemda	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 0	1 Dokumen	58 %	15,000,000						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	100 0	17,250,000											
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Jumlah dokumen rencana induk SPBE yang tersusun	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Dokumen	58 %	50,000,000						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	100 0	57,500,000											
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Jumlah pusat data / data center yang dikelola	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Data center	58 %	50,000,000						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	100 0	57,500,000											
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Jumlah laporan sistem komunikasi intra pemda	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 0	1 Dokumen	58 %	15,000,000						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	100 0	17,250,000											
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 0	1 Dokumen	58 %	20,000,000						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	100 0	23,000,000											
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi data/ informasi elektronik	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 0	1 Dokumen	58 %	30,000,000						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	100 0	34,500,000											
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Jumlah aplikasi informatika yang diadakan	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Aplikasi	58 %	30,000,000						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	100 0	34,500,000											
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Jumlah laporan sistem penghubung layanan pemerintah	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Dokumen	58 %	15,000,000						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	100 0	17,250,000											
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Jumlah dokumen rencana induk smart city yang dibuat	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Dokumen	58 %	350,000,000						Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	100 0	402,500,000											

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	21	02	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					23,000,000				27,025,000					
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menerapkan tata kelola keamanan data dan informasi dengan baik	Jumlah laporan pengawasan pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah laporan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	Kab. Banggai, Luwuk, Karaton	100 0	1 Dokumen	1 dok	23,000,000			Persentase perangkat daerah yang menerapkan tata kelola keamanan data dan informasi dengan baik	100 0	27,025,000
TOTAL										8,561,867,783				10,409,790,414				